

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
TAHUN 2026 – 2029

- Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang
- Fungsi : a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan dan perencanaan pelaksanaan urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
b. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
c. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang
d. Pengoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang
e. Pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan dan bidang pekerjaan umum dan tata ruang; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Tujuan : Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas

Kode	Indikator Kinerja Utama
I.K.T	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
a.	Definisi
b.	Satuan
	Indeks, dengan dengan skala akhir 25-100. Nilai dapat pula dipahami sebagai poin indekas Sifat indikator Positif : semakin tinggi nilai, semakin baik
c.	Formula perhitungan
	Menghitung Nilai Rata-rata Terimbang $\text{Bobot Nilai Rata – Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}}$ Menghitung Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) per unit pelayanan

	$IKLI = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ Interpretasi terhadap penilaian (IKLI) yaitu antara 25 – 100 sehingga hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 $IKLI \text{ Unit Pelayanan} \times 25$
d.	Sumber Data
	Laporan hasil Survey
e.	Penanggungjawab
	Dinas pekerjaan umum dan tata ruang
S.1	Meningkatnya kinerja irigasi
I.K.S.1	Nilai Indeks kinerja sistem irigasi
a.	Definisi
	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) adalah ukuran tingkat keberhasilan atau kondisi pengelolaan jaringan irigasi. Nilai ini menunjukkan baik atau buruknya fungsi sistem air untuk pertanian. Penilaian dilakukan secara berkala untuk melihat efisiensi distribusi air dan kondisi fisik saluran Penilaian IKSI memakai enam aspek penting: • Prasarana fisik : Kondisi saluran, pintu air, dan bangunan pelengkap. • Produktivitas tanam: Keberhasilan luas panen dan hasil pertanian. • Sarana penunjang: Alat ukur, papan operasi, dan kendaraan operasional. • Organisasi personalia: Jumlah dan kemampuan tenaga pengelola. • Dokumentasi: Ketersediaan peta, data, dan buku laporan. • Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A): Keaktifan organisasi petani dalam menjaga saluran.
b.	Satuan
	Indeks, dengan rentang nilai 0 –100 Sifat indikator Positif: semakin tinggi nilai, semakin baik
c.	Formula perhitungan
	$IKSI = \sum (\text{Nilai Aspek} \times \text{Bobot Aspek})$ Sangat Baik: > 85% Baik: 70% - 85%

	Cukup/Sedang: 55% - 69% Kurang: < 55%
d.	Sumber Data
	Indeks Kinerja Sistem Irigasi diperoleh dari aplikasi e-PAKSI oleh Kementrian PUPR
e.	Penanggungjawab
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
S.2	Meningkatnya Ketersediaan Air baku
I.K.S.2	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten
a.	Definisi
	Persentase Kapasitas Daya Tampung Air Waduk Kabupaten adalah indikator kinerja infrastruktur sumber daya air yang mengukur proporsi volume air yang mampu ditampung secara optimal oleh seluruh waduk/embung di bawah kewenangan pemerintah kabupaten dibandingkan dengan total daya tampung desain (kapasitas tampung maksimal/efektif) dari waduk-waduk tersebut. Volume daya tampung kapasitas waduk (kapasitas ideal) adalah 16.869.680 meter kubik. Pengukuran persentase kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten dilakukan kumulatif, dihitung peningkatan setiap tahun.
b.	Satuan
	Persen (%) Sifat indikator Positif: semakin tinggi nilai, semakin baik
c.	Formula perhitungan
	Volume daya tampung waduk kabupaten dibagi volume daya tampung kapasitas waduk (kapasitas ideal) dikali 100%
d.	Sumber Data
	Laporan data survey daya tampung air waduk yg diolah Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
e.	Penanggungjawab
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
S.3	Meningkatnya kapasitas pengendalian banjir
I.K.S.3	Persentase penanganan sungai dan anak sungai penyebab banjir
a.	Definisi

	Persentase Penanganan Sungai dan Anak Sungai Penyebab Banjir adalah indikator kinerja infrastruktur sumber daya air yang mengukur sejauh mana panjang sungai dan anak sungai yang rawan memicu banjir telah ditangani melalui kegiatan fisik, perbaikan, maupun pemeliharaan struktur sungai. Penanganan yang dihitung mencakup berbagai upaya struktural teknis, seperti: • Normalisasi dan Pengerukan: Pengerukan endapan lumpur (sedimentasi) dan pelebaran alur sungai untuk mengembalikan kapasitas tampung alirannya. • Pembangunan/Perkuatan Tanggul: Pembuatan dinding penahan tanah, bronjong, atau tanggul beton di sepanjang bantaran sungai untuk mencegah luapan air. • Rehabilitasi Tebing Sungai: Penanganan perkuatan lereng untuk mencegah erosi, longsor tebing, atau pendangkalan. • Pembangunan Sarana Pengendali : Pembuatan pintu air, serta kolam retensi/retensi banjir di sepanjang sistem sungai. Total Panjang Sungai Dan Anak Sungai (saluran pembuang) di kabupaten gresik sepanjang 350 Km
b.	Satuan
	Persen (%) Sifat indikator Positif: semakin tinggi nilai, semakin baik
c.	Formula perhitungan
	$\frac{\text{panjang saluran pembuang/sungai kondisi baik (Km)}}{\text{panjang saluran pembuang/sungai (Km)}} \times 100\%$
d.	Sumber Data
	Laporan Data survey saluran pembuang yang diolah Dinas pekerjaan umum dan tata ruang
e.	Penanggungjawab
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
S.4	Kemantapan infrastruktur jalan
I.K.S.4.1	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten
a.	Definisi
	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten adalah indikator kinerja infrastruktur yang mengukur proporsi panjang jalan kabupaten

	berkondisi mantap (kombinasi kondisi baik dan sedang) dibandingkan dengan total panjang seluruh jalan dalam kewenangan kabupaten tersebut. Berdasarkan standar Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), kondisi jalan dibagi menjadi empat kategori: • Kondisi Mantap: 1. Baik (B): Jalan rata, tidak ada retak/lubang berarti, dan dapat dilalui dengan kecepatan desain optimal. 2. Sedang (S): Jalan memiliki sedikit kerusakan ringan (retak halus atau kekasaran permukaan), tetapi masih layak dan aman dilalui. • Kondisi Tidak Mantap: 3. Rusak Ringan (RR): Terdapat retak memanjang/melintang, lubang-lubang kecil, atau penurunan gelombang minor. 4. Rusak Berat (RB): Permukaan jalan hancur, lubang besar/dalam, struktur fondasi rusak, dan sulit dilalui kendaraan. Total Panjang Jalan Kabupaten berdasarkan pada data Baseline tahun 2024 Sepanjang 566,61 Kilometer dan rencana penambahan ruas menjadi 579,014 Kilometer
b.	Satuan
	Persen (%0 Sifat indikator Positif: semakin tinggi nilai, semakin baik
c.	Formula perhitungan
	Panjang jalan kondisi baik ditambah panjang jalan kondisi sedang dibagi panjang total jalan kabupaten dikali 100%
d.	Sumber Data
	Laporan data survey jalan Kabupaten yang diolah Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
e.	Penanggungjawab
	Dinas pekerjaan umum dan tata ruang
I.K.S.4.2	Persentase Kemantapan Jalan Poros desa
a.	Definisi
	Persentase Kemantapan Jalan poros desa adalah indikator kinerja infrastruktur yang mengukur proporsi panjang jalan poros desa

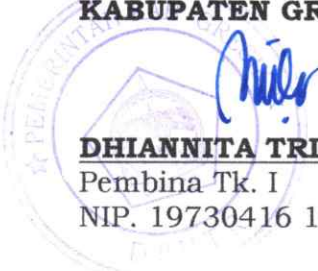
	berkondisi mantap (kombinasi kondisi baik dan sedang) dibandingkan dengan total panjang seluruh jalan poros desa tersebut. Berdasarkan standar Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), kondisi jalan dibagi menjadi empat kategori: • Kondisi Mantap: 1. Baik (B): Jalan rata, tidak ada retak/lubang berarti, dan dapat dilalui dengan kecepatan desain optimal. 2. Sedang (S): Jalan memiliki sedikit kerusakan ringan (retak halus atau kekasaran permukaan), tetapi masih layak dan aman dilalui. • Kondisi Tidak Mantap: 3. Rusak Ringan (RR): Terdapat retak memanjang/melintang, lubang-lubang kecil, atau penurunan gelombang minor. 4. Rusak Berat (RB): Permukaan jalan hancur, lubang besar/dalam, struktur fondasi rusak, dan sulit dilalui kendaraan. Total Panjang Jalan Poros Desa berdasarkan pada data baseline tahun 2024 Sepanjang 428,607 Kilometer.
b.	Satuan
	Persen Sifat indikator Positif: semakin tinggi nilai, semakin baik
c.	Formula perhitungan
	Panjang jalan kondisi baik ditambah panjang jalan kondisi sedang dibagi panjang total jalan poros desa dikali 100%
d.	Sumber Data
	Laporan data survey jalan poros desa yang diolah Dinas pekerjaan umum dan tata ruang
e.	Penanggungjawab
	Dinas pekerjaan umum dan tata ruang
S.5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang daerah
I.K.S.5	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah
a.	Definisi

	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah indikator yang mengukur sejauh mana realisasi penggunaan/pemanfaatan lahan di suatu wilayah telah sesuai dengan peruntukan ruang yang ditetapkan dalam dokumen RTRW. Tujuan dari Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Luas ruang daratan yang diatur dalam rencana tata ruang seluas 125.676,85 Ha
b.	Satuan
	Persen Sifat indikator Positif: semakin tinggi nilai, semakin baik
c.	Formula perhitungan
	$\frac{\text{Luas kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang (Ha)}}{\text{Luas ruang daratan yang diatur dalam rencana tata ruang (Ha)}} \times 100\%$
d.	Sumber Data
	Data Jumlah Pemohon pemanfaatan ruang melalui aplikasi GO Putar Dinas pekerjaan umum dan tata ruang
e.	Penanggungjawab
	Dinas pekerjaan umum dan tata ruang
S.6	Meningkatnya ketersediaan tanah untuk program pembangunan prioritas daerah
I.K.S.6	Persentase luas lahan yang dibebaskan sesuai dengan rencana kebutuhan prioritas daerah
a.	Definisi
	Persentase luas lahan yang dibebaskan sesuai dengan rencana kebutuhan prioritas daerah adalah indikator kinerja pembangunan yang mengukur capaian realisasi pembebasan/pengadaan tanah untuk kepentingan umum dibandingkan dengan target luas lahan yang telah direncanakan dalam dokumen prioritas pembangunan daerah. Komponen Utama 1. Luas Lahan Prioritas yang Berhasil Dibebaskan : Luas tanah yang telah selesai proses pengadaan/ganti rugi dan dokumen kepemilikannya telah beralih menjadi aset Pemerintah Daerah

	pada periode berjalan. 2. Target Luas Lahan Sesuai Rencana Prioritas : Total kebutuhan lahan yang tercantum dalam dokumen rencana prioritas untuk mendukung program-program strategis Pengukuran persentase lokasi tanah yang dibebaskan dilakukan secara periodik setiap satu tahun.
b.	Satuan
	Persen Sifat indikator Positif: semakin tinggi nilai, semakin baik
c.	Formula perhitungan
	Jumlah lahan yang dibebaskan (Ha) dibagi Jumlah luas kebutuhan (Ha) dikali 100%
d.	Sumber Data
	Laporan kegiatan hasil pembebasan lahan yang dikeluarkan oleh Dinas pekerjaan umum dan tata ruang
e.	Penanggungjawab
	Dinas pekerjaan umum dan tata ruang

Gresik, Juli 2026

**KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN GRESIK**


DHIANNITA TRI ASTUTI, ST, M.MT
Pembina Tk. I
NIP. 19730416 199901 2 002